BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencatatan serta Pelindungan Rahasia Dagang DJKI Kemenkumham Yogyakarta

1. Pelaksanaan Pencatatan Rahasia Dagang Di DJKI Kemenkumham Yogyakarta

Rahasia dagang (*Trade Secret*) dalam Pasal 1 ayat (1) UU 30/2000 mengenai Rahasia Dagang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomi. Memahami definisi ini membantu dalam penerapan dan pelindungan rahasia dagang, serta memastikan bahwa informasi berharga tetap terlindungi dari kebocoran dan penggunaan yang tidak sah.⁵⁹ Dalam Pasal ini terdapat tiga unsur utama yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu rahasia dagang, yaitu:

- a. Informasi yang memiliki nilai ekonomi atau komersial
- b. Nilai ekonomi atau komersial merupakan sebuah nilai yang berhubungan dengan pendapatan di dalam kegiatan bisnis. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (3) UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang bahwa informasi yang dirahasiakan harus dapat menunjang kegiatan atau usaha yang memiliki nilai komersial.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁶⁰ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

- c. Informasi yang tidak bersifat publik.
- d. Informasi tersebut harus dilindungi kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dijelaskan bahwa cakupan atau ruang lingkup rahasia dagang yang mencakup berbagai informasi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik, ini termasuk:⁶¹

- a. Metode produksi: proses atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk.
- b. Metode pengolahan: cara-cara dalam memproses bahan mentah menjadi produk akhir.
- c. Metode penjualan: strategi atau teknik pemasaran yang digunakan untuk menjual produk.
- d. Informasi bisnis lainnya: data atau informasi terkait teknologi dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan kompetitif.

Pentingnya rahasia dagang adalah untuk melindungi inovasi dan strategi bisnis dari penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga menciptakan iklim persaingan yang sehat. Informasi teknis merupakan suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian atau pengembangan dalam menunjang suatu kegiatan teknologi dan/atau bisnis, informasi yang berkaitan dengan manufaktur, serta kecakapan teknik atau *know how*. Sedangkan informasi non teknis menyangkut informasi tentang

⁶¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

pelanggan dan kebijakan perusahaan.⁶² Informasi manufaktur merupakan suatu hal yang berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk yang nantinya akan melewati beberapa tahapan dalam produksi.⁶³

Rahasia dagang sangat penting bagi inovasi perdagangan atau bisnis dalam skala global. Hal ini disebabkan rahasia dagang merupakan suatu konsep hukum yang sangat rumit untuk dipahami dan sulit untuk didefinisikan. Karena di dalam lingkup informasi rahasia dagang tidak adanya definisi yang pasti, hal ini dapat banyak mencakup spektrum yang termasuk kedalam suatu informasi rahasia dagang.⁶⁴ Rahasia dagang menjadi aspek penting dalam mempertahankan eksistensi suatu bisnis dalam menghadapi dunia persaingan bisnis.⁶⁵

Informasi yang dianggap rahasia yaitu berkaitan dengan pemilik dari rahasia dagang yang telah melakukan upaya perlindungan dengan cara-cara yang seharusnya dan memadai untuk menjaga kerahasiaan di dalam rahasia dagang.⁶⁶ Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam menjaga informasi tersebut diantaranya: menempelkan tulisan “Selain Karyawan Dilarang Masuk”/ “Staff Only”

⁶² Faranita Ratih L, “Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dari Hasil Penelitian Hibah sekolah Vokasi IPB Tahun 2020”, *Jurnal Sains Terapan* 11, no. 1, (2021): 108.

⁶³ Awang Andhyka, Rizky Aditya N, dan Vivi Izzah Nur Kholifah, “Penerapan Metode Waterfall Dalam Sistem Informasi Manufaktur Pada Usaha Fitria Konveksi”, *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan ITATS X*, (2022): 1

⁶⁴ Emmy Febriani T, Dwi Novita S, dan Luh Putu Rara A R, “Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia”, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Ummas Denpasar* 02, no.02, (2022): 83

⁶⁵ Novelinda S, dan G. Sembel, “Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”, *Lex Privatum* VI, no. 1, (2018): 153

⁶⁶ Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

atau “*No Trasspassing*”, menempelkan tulisan peringatan “Dilarang Mengambil Gambar”, atau “Dilarang Memotret”, dan jika terdapat data rahasia di dalam komputer maka dapat dipasang “Password Rahasia Dagang”, bisa membuat “Confidentiality Agreement” sebagai perjanjian atau kontrak antara karyawan dengan perusahaan agar saling menjaga rahasia dagang, dilarang mengcopy dokumen penting perusahaan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjaga informasi di dalam perusahaan..⁶⁷

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau pemilik bisnis maka menjadikan bidang rahasia dagang ini memiliki keunikan dibandingkan dengan bidang HKI yang lainnya. Keunikan dari rahasia dagang adalah rahasia dagang tidak perlu untuk didaftarkan kepada DJKI dalam mengklaim suatu perlindungan melainkan hanya sebatas pencatatan baik itu dalam perjanjian lisensi ataupun pengalihan hak serta pelindungannya telah melekat secara otomatis terhadap suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaan oleh pemiliknya..⁶⁸

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat menjadi DJKI, adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan KI sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga DJKI juga

⁶⁷ Agus Broto Susilo, *Tim Analisa Dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2010): 26.

⁶⁸ Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (PT Elex Media Komputindo, 2012), 94.

menaungi dan melindungi sebuah HKI yang dihasilkan oleh setiap pencipta berdasarkan karyanya. Yang mana DJKI akan memberikan sebuah perlindungan serta kepastian hukum kepada pemegang HKI yang telah didaftarkan atau hanya sekedar melakukan pencatatan perjanjian lisensi kepada pihak lain dalam menikmati suatu manfaat atau menggunakan hak yang ada di dalam kekayaan intelektual.⁶⁹ Dalam Pasal 4 UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang menetapkan hak-hak penting bagi pengguna dari rahasia dagang, termasuk hak untuk menggunakan informasi rahasia dagang secara eksklusif dan hak yang bertujuan untuk mengatur atau melarang penggunaan dan pengungkapan informasi oleh pihak lain. Memahami dan menerapkan hak-hak ini dengan efektif adalah kunci untuk memanfaatkan dan melindungi rahasia dagang dalam kegiatan bisnis.

Lisensi dalam Pasal 1 ayat (5) UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang menggarisbawahi lisensi merupakan izin untuk menggunakan rahasia dagang yang diberikan oleh pemegang hak, tanpa mengalihkan kepemilikan rahasia dagang itu sendiri. Lisensi diatur dengan syarat dan batas waktu tertentu, memberikan fleksibilitas kepada pemegang hak untuk mengatur dan memanfaatkan rahasia dagang secara strategis. Tujuan pemberian izin lisensi kepada pihak lain adalah untuk menikmati manfaat dari rahasia dagang atau bidang kekayaan intelektual yang lainnya. Sehingga berbeda dengan pengalihan kepemilikan yang mana

⁶⁹ R. Rahaditya dkk, "Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 6, no.2, (2023): 753.

suatu ciptaan yang dihasilkan akan seluruhnya dialihkan kepada pihak lain sehingga pemegang dari ciptaannya tidak mempunyai haknya lagi.⁷⁰ Menurut Pasal 5 UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang, pengalihan hak dan lisensi dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang diperbolehkan oleh peraturan ini.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM memberikan fasilitas untuk para pihak jika ingin melakukan pengalihan hak atau pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang kepada orang lain, yang kemudian akan dicatatkan di dalam suatu Berita Acara Resmi Rahasia Dagang di DJKI. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, telah secara terperinci menjelaskan alur dan syarat dalam pencatatan HKI termasuk rahasia dagang. Dalam Pasal 2 ayat (2) dalam peraturan yang sama, menyatakan bahwa pencatatan lisensi dapat dilakukan berdasarkan suatu permohonan.⁷¹ Dalam Pasal 3 Peraturan yang sama, dinyatakan bahwa permohonan pencatatan dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Menteri, baik secara elektronik maupun non elektronik. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 5 ayat (2)

⁷⁰ Bakri, "Perbedaan Pengalihan Hak Cipta dan Pemberian Lisensi," UNCHATEGORIES: 25 Juni 2022, diakses tanggal 12 Juni 2024, <https://bakri.uma.ac.id/hak-cipta-dan-pemberian-lisensi/>.

⁷¹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

mengatur bahwa saat mengajukan permohonan, pemohon diwajibkan untuk menggugah atau melampirkan dokumen-dokumen berikut:

- a. Salinan perjanjian atau bukti perjanjian lisensi;
- b. Salinan atau petikan sertifikat bidang HKI baik Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- d. Asli bukti kepemilikan pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

Proses permohonan terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon dalam melakukan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang yang mana dipertegas Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengahruskan pencatatan pengalihan hak rahasia dagang di Direktorat Jenderal sebagai langkah administratif penting untuk memastikan kepemilikan dan hak penggunaan tercatat secara resmi. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum, transparansi, dan melindungi hak-hak pemegang rahasia dagang dari sengketa dan masalah administratif. Adapun biaya dalam pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan website dari DJKI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

No	PNBP Rahasia Dagang	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
	a. UMKM	Per Permohonan	200.000
	b. Umum	Per Permohonan	400.000
2.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
	a. UMKM	Per Permohonan	150.000
	b. Umum	Per Permohonan	250.000

Tabel 1 Biaya Pencatatan Rahasia Dagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif Nuryono Tunggal, selaku Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwasannya pihak DJKI memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian terdahulu atau bukti kepemilikan atas rahasia dagang yang akan diberikan kepada pihak lain. Yang mana para pihak dapat membuat sebuah perjanjian baik dihadapan notaris ataupun perjanjian dibawah tangan. Sehingga pihak DJKI tidak menentukan bentuk dari perjanjian terdahulu melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini bertujuan sebagai bukti bahwasannya pihak-pihak telah melakukan suatu perjanjian terdahulu dan para pihak bisa langsung membuat permohonan pencatatan kepada DJKI.⁷²

⁷² Hasil wawancara, Arif Nuryono Tunggal, selaku Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tanggal 28 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam sengketa rahasia dagang. Kekuatan akta otentik ini sangat tinggi sebagai alat bukti, karena mengikat para pihak dan dianggap benar oleh hakim dalam kasus sengketa rahasia dagang. Namun untuk memperkuat pembuktiannya, akta otentik tersebut harus dicatatkan pada DJKI. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (4) UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan para Direktorat Jenderal tidak mengikat pihak ketiga secara hukum. Sehingga dengan dicatatkannya akan mendapatkan perlindungan serta mendapatkan pengakuan dari negara terhadap suatu perjanjian lisensi yang telah dicatatkan. Dan apabila tidak dicatatkan maka perjanjian yang telah dibuat akan tetap menimbulkan suatu hak dan kewajiban.⁷³

Adapun alur di dalam proses pencatatan perjanjian lisensi yang dapat dilakukan oleh para pihak berdasarkan permohonan secara elektronik, sebagai berikut:⁷⁴

1. Pemohon dapat membuat akun terlebih dahulu.
2. Kemudian pemohon mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi dengan memilih opsi menu “permohonan” lalu “pencatatan” perjanjian.

⁷³ Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhamad Amirulloh dan Kilkoda Agus Saleh, “Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak”, *Jurnal Litigasi* 22, No. 1, (2021): 114-118.

⁷⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, Panduan Penggunaan Aplikasi Rahasia Dagang, diakses tanggal 5 Juli 2024, <https://rd.dgip.go.id/assets/panduan/Panduan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Rahasia%20Dagan%20g.pdf>

3. Setelah itu pemohon akan mengisi formulir pencatatan perjanjian lisensi.
4. Kemudian pemohon akan melampirkan data berupa surat kuasa, surat bukti kepemilikan RD, surat perjanjian lisensi, identitas pemberi, identitas penerima, akta badan hukum untuk surat keterangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan surat pernyataan UMK yang mana akan muncul ketika memilih jenis permohonan UMK.
5. Setelah itu, tunggu proses pengajuan pencatatan perjanjian lisensi selesai dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan PNBP yang tertera.

Adapun data permohonan kekayaan intelektual yang telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kota Yogyakarta pada rentang waktu 4 tahun kebelakang yang telah dicantumkan dalam latar belakang maka pihak DJKI Kota Yogyakarta memiliki target pada tahun 2024 yaitu 17% permohonan dari tahun 2023, dan pada tahun 2020 sampai 2023 memiliki target 600 permohonan. Hal ini memiliki perubahan angka target dari 2023 terhadap 2024 yang mana dari target angka menjadi target yang ditentukan dalam bentuk persen. Dan dengan target yang ada serta data angka maka dapat melihat bahwasannya bidang kekayaan intelektual yaitu rahasia dagang tidak populer dibandingkan dengan bidang kekayaan intelektual yang lainnya dan angka pencatatannya tidak berubah secara signifikan

sehingga dapat dikatakan tidak efektif dibandingkan dengan Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri.⁷⁵

2. Pelindungan Rahasia Dagang

Pelindungan yang diberikan kepada pemegang hak kekayaan intelektual yaitu berupa pengakuan dari negara atas suatu penemuan atau penciptaan sehingga wujud dari pelindungan tersebut dapat diperoleh pada proses penegakkan hukum. Dengan adanya pelindungan ini maka menjadi sebuah jaminan secara yuridis untuk mencegah terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang telah didaftarkan atau hanya sekedar pencatatan perjanjian lisensi.⁷⁶ Selain itu, di dalam Pasal 5 ayat (3) *jo* Pasal 8 ayat (1) UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, disebutkan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Istilah “wajib” dalam pasal-pasal tersebut merujuk pada kewajiban mencatatkan data administratif dari dokumen pengalihan hak, bukan mencakup substansi dari rahasia dagang yang disepakati.⁷⁷ Oleh sebab itu, DJKI memberikan wadah atau fasilitas terhadap rahasia dagang dalam melakukan suatu pencatatan perjanjian lisensi kepada

⁷⁵ *Op. Cit.*, Hasil wawancara.

⁷⁶ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1, (2020): 49-50.

⁷⁷ Vince Kristiawan Zai, Skripsi: *Tanggungjawab Pemegang Lisensi Terhadap Pembocoran Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, (Sumatera Utara: Universitas HKBP NOMMENSEN, 2018), 26.

pihak lain. Maka apabila seseorang mempunyai penemuan di dalam perusahaan maka perusahaan harus memprioritaskan untuk menjaga kerahasiaan ataupun dapat mematenkan penemuan tersebut.⁷⁸

Pada prinsipnya rahasia dagang tidak termasuk kedalam prinsip pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual yaitu *first to file* atau *first to use*. Dalam konteks prinsip *first to use* akan sulit membuktikan siapa yang menjadi pemegang haknya jika terjadi sebuah masalah di dalam rahasia dagang.⁷⁹ Oleh sebab itu, adapun di dalam UU 30/2000 mengenai Rahasia Dagang telah mengatur berbagai bentuk perlindungan untuk rahasia dagang tersebut, diantaranya dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Dalam pengalihan atau pencatatan lisensi kepada pihak lain terdapat suatu unsur kontrak atau perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU 30/2000 mengenai Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa pengguna hak rahasia dagang memiliki hak untuk menyerahkan lisensi atau izin kepada orang lain. Lisensi ini bertujuan untuk melakukan semua tindakan yang diatur dalam Pasal 4 UU tersebut, kecuali jika di perjanjian lisensi merupakan suatu persetujuan yang diberikan kepada pihak kedua untuk memanfaatkan rahasia dagang, sehingga perjanjiannya harus secara tertulis. Dan di dalam Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perjanjian yang dilakukan harus mencantumkan

⁷⁸ Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press, 2016.

⁷⁹ Muhammad Fikry Haikal, Skripsi: *Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 24.

segala aspek yang diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada rahasia dagangnya.

- b. Rahasia dagang memiliki suatu hak eksklusif bagi pemilik rahasia dagang, sehingga dengan adanya hak eksklusif ini diharapkan dan mampu untuk menjaga suatu kerahasiaan dari rahasia dagang itu sendiri.
- c. Terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Erat kaitannya dengan suatu prinsip hukum dalam menjaga atau melindungi suatu objek. Maka di dalam rahasia dagang dengan adanya suatu unsur perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menjadi sebuah perlindungan bagi rahasia dagang ketika terjadi sebuah perjanjian antara para pihak yang terikat suatu kontrak atau perjanjian.
- d. Pasal 11 dan Pasal 12 UU 30/2000 menyediakan kerangka hukum untuk proses penyelesaian sengketa mengenai rahasia dagang. Pencatatan sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif seperti arbitrase. Hal ini memastikan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi memiliki opsi untuk menuntut perlindungan dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku..
- e. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU 30/2000 mengenai Rahasia Dagang memberikan kerangka hukum untuk pengalihan hak rahasia dagang. Pasal 5 mengatur tentang berbagai cara pengalihan hak yaitu termasuk hibah, wasiat, waris dan perjanjian tertulis, sedangkan Pasal 6 fokus pada pengalihan hak melalui perjanjian lisensi. Kedua pasal ini

memberikan fleksibilitas dalam pengalihan hak rahasia dagang, dengan memberikan kepastian bahwa segala proses dalam pengalihan berdasarkan regulasi yang berlaku.

- f. Dalam rahasia dagang tidak ada batasan waktu perlindungan hukumnya selama informasi yang dianggap penting bagi suatu bisnis tetap dirahasiakan oleh pemilik atau penerima rahasia tersebut. Hal ini berbeda dengan HKI lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu dalam pelindungannya.

B. Peran DJKI Kanwil Yogyakarta dalam sistem pengawasan terhadap penyelesaian sengketa Rahasia Dagang di Kota Yogyakarta.

1. Peran DJKI Kemenkumham dalam sistem pengawasan terhadap Rahasia Dagang.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat menjadi DJKI adalah pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan pencatatan perjanjian lisensi atau pengalihan hak atas rahasia dagang yang nantinya akan diterbitkan dan akan diumumkan di dalam Berita Acara Resmi Rahasia Dagang.⁸⁰ DJKI memiliki peran dalam melindungi hasil karya dari para pelaku industri kreatif. Sehingga, DJKI memiliki peran untuk mengelola perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang KI berdasarkan regulasi yang ada. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah dorongan kepada para

⁸⁰ Micheal & Christine S.T. Kansil, "Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HAKI Terhadap Kasus Pendomplengan Nama/*Passing Off* Terhadap Merek Terkenal "M&G" Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan No. 526K/PDT.SUS-HKI/2020)", *Jurnal Hukum Adigama* 4, no.2, (2021): 441.

pencipta, industri dan publik untuk dapat menciptakan karya dan inovasi agar mendapatkan penghargaan atas suatu hal yang diciptakan.⁸¹

Peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah memberikan izin kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang kemudian dicantumkan dalam Berita Acara Resmi Rahasia Dagang. Maka DJKI bertanggungjawab atas perlindungan dan pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun peran lain yaitu dengan memberikan suatu kepastian hukum terhadap kekayaan intelektual yang telah didaftarkan atau hanya dilakukan pencatatan perjanjian lisensi. Sehingga DJKI memiliki peran yang sangat penting dalam menerima permohonan pencatatan pengalihan hak atau pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang. Hal tersebut juga didukung dengan sosialisasi, asosiasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait pentingnya suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi.⁸²

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selain menjadi pihak ketiga dalam pemberian lisensi, sosialisasi, asosiasi dan kepastian hukum DJKI juga telah melakukan suatu sistem pemantauan yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menjaga iklim yang sehat di dalam

⁸¹ Celine Jasmin Andrianto, Skripsi: *Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Menerima permohonan Merek dari Pemilik Merek Terkenal*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2024), 27.

⁸² Hasil wawancara, Arif Nuryono Tunggal, selaku Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tanggal 28 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

bidang kekayaan intelektual. DJKI dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa terkait KI termasuk rahasia dagang. Fungsi mereka mencakup mulai dari pencegahan dan bimbingan teknis, hingga penyidikan dan penindakan pelanggaran.⁸³ Hal ini sesuai dengan Pasal 286 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain peran yang telah disebutkan di atas, Arif Nuryono Tunggal selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa dalam mencapai target jumlah angka permohonan pihak DJKI selain dengan melakukan sosialisasi, asosiasi dan edukasi lembaga juga melakukan diseminasi atau penyebaran informasi dan juga melakukan kerjasama dengan stakeholder dinas-dinas terkait yang ada di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta serta melakukan kerjasama dengan Bidang Hukum (Bidkum) polda DIY dalam memberikan sosialisasi terhadap Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).⁸⁴

2. Penyelesaian sengketa oleh DJKI Kemenkumham Yogyakarta.

⁸³ Kanwil Kalteng, "Tingkatan Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kalimantan Tengah Sambangi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa," diakses tanggal 5 Juni 2024, <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/19750-tingkatan-pemantauan-dan-pengawasan-kekayaan-intelektual-kanwil-kalimantan-tengah-sambangi-direktorat-penyidikan-dan-penyelesaian-sengketa>

⁸⁴ *Op. Cit.*, Hasil wawancara.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses dimana kedua belah pihak ataupun lebih mengikuti prosedur atau memilih prosedur dalam menyelesaikan sebuah perselisihan yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat terjadi pada setiap individu, para pihak, kelompok, perusahaan bahkan antara negara. Sengketa dapat bersifat publik ataupun keperdataan yang dapat terjadi baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Sengketa dapat menimbulkan suatu perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan bahkan pertikaian.⁸⁵

Secara prinsip, penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (*ligitation*) dan jalur luar pengadilan (*non ligitation*). Jalur pengadilan melibatkan proses penyelesaian sengketa dengan lembaga pengadilan. Sedangkan di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Jalur litigasi dianggap sebagai “*the last resort*” atau upaya terakhir yaitu ketika upaya terakhir jika penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kekeluargaan tidak menemukan suatu hasil. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi menerapkan mekanisme dengan mengupayakan “*creative compromise*” yang ditempatkan sebagai “*the first resort*” hal ini menitik beratkan pada proses musyawarah, perdamaian, kekeluargaan penyelesaian sengketa adat dan lain sebagainya.⁸⁶

⁸⁵ Juwita Tarochi B, Budi Santoso, dan Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin,” *Notarius* 13, no. 2, (2020): 804.

⁸⁶ Dewi Sulistianingsih, dan Pujiono, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: BPFH UNNES, 2019), 14.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan suatu ekspresi dari responsif yang tidak puas terhadap penyelesaian sengketa secara litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (*njeimet*, bertele-tele).⁸⁷ Sehingga pada praktiknya masyarakat lebih cenderung memilih jalur non litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi.⁸⁸ Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari segi kerahasiaan sengketa para pihak yang tidak akan terpublikasikan, menghindari keterlambatan yang diakibatkan dari adanya proses prosedural atau administratif, menyelesaikan masalah dengan cara komprehensif dan kebersamaan serta tetap menjaga suatu hubungan baik dengan para pihak.⁸⁹ Adapun beberapa pelanggaran yang dapat dikategorikan kedalam pelanggaran rahasia dagang, yaitu:⁹⁰

- a. Terdapat pihak lain yang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis, untuk saling menjaga rahasia dagang tersebut;

⁸⁷ Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Nonlitigasi*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010), 66

⁸⁸ Hasil wawancara, Arif Nuryono Tunggal, selaku Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tanggal 28 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

⁸⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 2.

⁹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, “Rahasia Dagang”, diakses 8 Juli 2024, <https://dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan>.

- b. Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

Apabila benar telah terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk rahasia dagang yang termasuk suatu delik aduan maka sebaiknya pemilik perlu untuk melakukan suatu analisa terlebih dahulu terhadap pelanggaran tersebut, adapun analisa yang dapat dilakukan oleh pemilik, diantaranya:⁹¹

- a. Analisa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dengan melihat informasi yang digunakan termasuk rahasia dagang atau bukan. Jika benar maka pemilik juga harus melihat apakah pihak tersebut memiliki izin atas rahasia dagang tersebut atau tidak.
- b. Kemudian jika hal tersebut tidak terpenuhi maka dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pemilik dapat melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Pada rahasia dagang proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dengan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) hal ini dipertegas di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menangani proses penyelesaian sengketa secara

⁹¹ Lily Evelina Sitorus, "Cara Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang" Hukum Online, 17 Juni 2021, diakses 8 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-penyelesaian-sengketa-rahasia-dagang-lt5fd2626a0ba82/>.

mediasi. Walaupun di dalam prosesnya DJKI tidak memiliki kewenangan dalam menjadi pihak penengah melainkan akan dibantu oleh pihak lain seperti mediator yang nantinya akan ditunjuk oleh hakim atau ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.⁹²

Pada proses mediasi para pihak harus hadir dalam perundingan yang akan diselenggarakan oleh mediator sehingga para pihak tidak boleh diwakilkan kecuali diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dan di dalam pelaksanaannya mediator bisa membatasi kehadiran dari kuasa hukum demi kelancaran proses perundingan. Jika salah satu pihak merupakan badan hukum maka dapat diwakili oleh salah satu pegawai yang berwenang dan sah berdasarkan surat kuasa khusus yang di dalamnya mencantumkan kapasitas dalam mewakili badan hukum tersebut, hal ini mencakup:

- a. Mewakili badan hukum
- b. Mengambil keputusan untuk dan atas nama badan hukum
- c. Membuat perdamaian untuk dan atas nama badan hukum

Ketika di dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi yang nantinya dimintakan kepada mediator, dengan tembusan kepada pihak lain dan pengurus. Dengan dibarengi oleh suatu alasan yang kuat sehingga dapat menunjukkan itikad baik dalam menjalani proses mediasi. Setelah proses mediasi selesai maka akan menghasilkan tiga hasil dari mediasi tersebut

⁹² *Op. Cit.*, Hasil wawancara.

yaitu kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian dan mediasi tidak mencapai perdamaian.⁹³

Pelaksanaan mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual, hal ini berbeda dengan proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mana pihak yang dapat menjadi mediator atau penengah harus mendapatkan pelatihan dan memperoleh suatu sertifikat mediator dari lembaga APS yang telah terakreditasi oleh MA.⁹⁴ Sedangkan mediasi di dalam pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan secara sukarela dengan dilakukan diluar pengadilan dan bisa juga sebagai bentuk mediasi penal pidana dengan pihak kepolisian sebagai penengahnya.⁹⁵

⁹³ Yosua Gabriel Pradipta, "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)," *Jurnal Pasca Sarajana Hukum UNS VII*, no. 2, (2019): 296.

⁹⁴ Iswi Haryani, Cita Yustisia serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 3.

⁹⁵ Fira Amalia Sugianto, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual," *Jurnal Meta Yuridis 5*, No. 1, (2022): 58.